

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DAN UPAYA BUMDes MAJU BERSAMA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

**DEPI PERMATA SARI
NIM. 11727200129**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSTUJUAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA**”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Depi Permata Sari

NIM : 11727200129

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan distujui untuk diujikan dalam sidang munaqasoh fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negri sultan syarifkasim riau

Pekanbaru, 10 September 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS SH., MH
NIK. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DAN UPAYA BUMDes MAJU BERSAMA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA”* yang ditulis oleh :

Nama : **Depi Permata Sari**
 NIM : 11727200129
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr.H.Erman, M.ag

Sekretaris
Hendri Sayurti, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Darwis., SH., MH

Penguji II
Dr. H. Maghfirah, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Depi Permata Sari
 NIM : 1172 72 00 129
 Tempat/Tgl. Lahir : Sawah, 27 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Penyaluran dana Dalam Penyediaan hewan ternak oleh
Bumdes Masu bersama Desa sawah berdasarkan Peraturan Desa Nomor
4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik desa dan Upaya BumDes
Masu bersama meningkatkan Perketonomian desa di Desa Sawah,
kecamatan kampar utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



Depi Permata Sari
 NIM : 1172 72 00 129

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Depi Permata Sari, (2021) : Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sawah Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa Dan Upaya BUMDes Maju Bersama Meningkatkan Perekonomian Desa Di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh BUMDes maju bersama desa sawah berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milk Desa dan upaya BUMDes maju bersama meningkatkan perekonomian desa di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh BUMDes maju bersama desa sawah berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milk Desa dan upaya BUMDes maju bersama meningkatkan perekonomian desa di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara agar berkembang pesat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai Aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa Juga Direksi BUMDes Maju Bersama Desa Sawah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil observasi peneliti mengenai pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh bumdes maju bersama desa sawah berdasarkan peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang badan usaha milk desa di desa sawah, kecamatan kampar utara bahwasanya aparat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga

State Islamic University of Sunan Kalijaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa hanya bertugas sebagai badan pengawas dalam BUMDes Maju Bersama, sedangkan dana BUMDes sendiri berasal dari dana desa dan dana provinsi, BANKU. Dimana dalam pengajuan dana BUMDes akan mengajukan poposal pada desa mengenai potensi desa yang akan dikembangkan, selanjutnya distujui oleh desa dan diajukan keprovinsi. Pelaksanaan penyaluran besaran dana akan ditentukan oleh Desa.

Sedangkan upaya BUMDes maju bersama meningkatkan perekonomian desa yaitu dengan adanya koordinasi yang baik antara aparat Desa dengan Direksi BUMDes Maju Bersama Desa sawah. Dimana dalam proses pengembangan potensi ini harus adanya upaya-upaya dari Direksi BUMDes Maju Bersama Desa Sawah atupun aparat desa guna menjalankan atau terlaksananya pengembangan potensi baru oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sawah. Juga dalam proses peningkatan perekonomian desa sangat dibutuhkan kerja sama yang baik untuk memajukan perekonomian desa agar menjadi desa yang mandiri. Menurut Kementerian Desa pada “UU Desa” dalam pasal 87 menyebutkan tentang wewenang pemerintah desa yang bisa membuat BUMDes dan seharusnya dibangun dengan penuh gairah kekeluargaan dan saling membantu, beserta pelaksanaan usaha dibidang ekonomi atau dinas yang memberikan pelayanan publik untuk memelihara desa dan menuju kesejahteraan masyarakat.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak M.SYAFI'I dan Ibu NURMIATI, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Ste Iamc Uiversity of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

2. Kepada kakak penulis Rati Meldasari, Eka Indriyani, S.Pd, dan adik penulis Murti Amalia yang juga telah memberikan dukungan dan doa yang membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku rektor universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis unuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan fakultas syariah dan hukum beserta jajaranya yang telah memberikan fasilitas kepada penullis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua jurusan ilmu hukum bapak Asril, SH, MH yang telah memberikan wawasan beserta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku penasehat akademik yang telah memberi dan meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan
8. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.
9. Seluruh teman dikos kak Rahmadanis, SP, kak Vita, kak Mardia, kak Popy, Revi, Melani, dan kak Har.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat terbaik IPA 3 2017 Nelki lestari, Elfi Rahma, Irfadilla Putri, Nurul Hidayah.

11. Dan sahabat terbaik di Progreption (IH A) Nurhalimah, Puja Wilanda, Revilfa Hafiza dan yang lainnya yang namanya tidak bisa dimakkan semua.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara..	15
1. Keadaan Geografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	15
2. Sejarah Desa Sawah	15
3. Keadaan dan Batas Wilayah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	16
4. Jumlah penduduk.....	17
5. Mata Pencaharian Penduduk atau Provesi Penduduk.....	18
6. Agama.....	19
7. Pendidikam	20
8. Sosial Budaya	21
9. Adat Istiadat	22
B. Visi Dan Misi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORISTIS	26
A. Pengertian Pelaksanaan.....	26
B. Penyaluran Dana.....	27
C. Peraturan Perundang Undangan.....	36
D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh BUMDes maju bersama desa sawah berdasarkan peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang badan usaha milk desa di desa sawah, kecamatan kampar utara.....	44
B. Upaya BUMDes maju bersama agar BUMDes berkembang dengan pesat dan dapat meningkatkan perekonomian.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.¹

Untuk menuju pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola daerah sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, terutama dalam bidang perekonomian akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya. Apalagi di era modern, memberikan peluang besar untuk setiap daerah yang terus berkembang dan memajukan daerahnya sendiri. Perkembangan perekonomian merupakan salah-satu penopang suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya

¹ Jurnal Harmiati, dan Abdul Aziz Zuhakim. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justeru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.²

Bukan saja daerah yang berdiri sendiri, tapi desa mempunyai otonom asli yang bisa mengelola, menjalankan, serta melaksanakan hak dan wewenang untuk mengembangkan potensi dan kualitas masyarakat yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola mulaidari sumber daya alam (tumbuhan, air, hewan, batu, minyak bumi) sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu dan membina dalam pelaksanaannya.

Sehingga desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pengarahan, pengelolaan akan pengembangan maupun bantuan modal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah akan memberikan modal sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada sesuaikan dengan kondisi desa sehingga mampu mengatasi masalahnya.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelolah pemerintah desa. Pemerintah desa selaku eksekutif di desa berperan aktif dalam menentukan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu pemerintah desa harus mampu

²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun pemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³

Dalam Peraturan Desa Sawah Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 4 huruf (e) mengatakan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sawah adalah Bidang Kehutanan, Perkebunan, perikanan perternakan dan bidang lainnya yang sejenis.

Seperti yang di ketahui dalam menjalankan usaha tentu akan sering berhadapan dengan adanya kendala-kendala. Sama halnya dengan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDes dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala. Sebut saja dari sektor simpan-pinjam dimana sering terjadi kendala dalam pengembalian atau pembayaran peminjaman oleh masyarakat di akibatkan oleh ekonomi yang sering naik turun. Dimana di desa sawah mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani karet, dimana masyarakat menggantungkan kehidupan dari keadaan cuaca yang mengakibatkan terjadinya tunggakan dalam pembayaran pinjaman dari sektor simpan pinjam.

Sama halnya dengan penyediaan pupuk oleh BUMDes, kendala cuaca juga mengakibatkan tunggakan dalam pembayaran pupuk. Sedangkan dalam

³ Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan sektor atau potensi penggemukan sapi atau penyediaan hewan ternak oleh BUMDes terdapat kendala dalam penyesuaian anggaran.

Seperti yang di ketahui dalam menjalankan usaha, tentu tidak dapat dipisahkan dengan jumlah anggaran dan dana. Dimana seharusnya jumlah anggaran harus sesuai dengan dana yang di butuhkan. Tapi apa yang akan terjadi jika jumlah anggaran yang sudah ditetpkan malah tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan? Sedangkan perencanaan sudah sampai pada penyusunan dan pengajuan proposal pada aparat desa. Maka disini saya sebagai penulis akan meneliti dan membahas mengenai pemecahan masalah oleh aparat desa dan juga direksi dari Bumdes Maju Bersama.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul:

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DAN UPAYA BUMDes MAJU BERSAMA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA

B. Batasan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian agar tidak memberikan pengertian yang luas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah *Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sawah Dan Upaya BUMDes Maju Bersama Meningkatkan Perekonomian Desa*. Mengenai langkah-langkah pelaksanaan penyaluran dana oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sawah, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BUMDes untuk penyesuaian anggaran jika tidak sesuai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh Bumdes Maju Bersama Desa Sawah Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa Di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara.
2. Bagaimana upaya BUMDes Maju Bersama agar BUMDes berkembang dengan pesat dan dapat meningkatkan perekonomian desa

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Upaya Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh Bumdes Maju Bersama Desa Sawah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa Di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara

- b. Untuk mengetahui upaya BUMDes Maju Bersama agar BUMDes berkembang dengan pesat dan dapat meningkatkan perekonomian desa

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bagi dua yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan implementasi dana bantuan operasional sekolah. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, praktisi hukum serta kalangan yang memiliki kepentingan dalam bidang kajian yang sama.⁴

b. Secara Praktis

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar SARJANA HUKUM (SH) dalam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca agar lebih memahami dalam bidang hukum dan pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pemberian putusan oleh hakim tentang tindak pidana pengedaran narkoba.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Sebagai sumbangan penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas syariah dan Hukum uiniversita islam negri sultan syarif kasim riau
4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
5. Diharap dapat menjadi alat pendorong bagi peneliti lain, yang ingin melakukan penelitaian lebih luas dan mendalam

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu.⁵ Penelitian ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan, sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁶

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 2.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), h. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian dilihat dari jenisnya penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian sosiologis dengan cara melakukan observasi wawancara dan kajian pustaka, karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survei ke lapangan melalui responden, dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.⁸

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mencoba meneliti dan menggambarkan suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di BUMDes Maju Bersama Desa sawah, Kecamatan Kampar utara, Kabupaten Kampar. Karena pada lokasi ini terdapat kendala mengenai jumlah dana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha pada BUMDes Maju Bersama Desa Sawah.

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembantuan sebagai sasaran.⁹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sawah, Direksi BUMDes Maju Bersama dan Masyarakat yang berdagang disekitar lokasi penelitian.

⁸ Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta :LP3ES,1989),H.35.
⁹ <https://kbbi.web.id/subjek.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penulisan ini ialah pelaksanaan dari Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

4. Populasi dan Sampel

Tabel I
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Aparat Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa)	3 orang	2 Orang	100%	Wawancara
2.	Aparat BUMDes maju Bersama Desa Sawah (Direksi BUMDes)	3 orang	1 Orang	100%	Wawancara

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dalam pengambilan populasi dan sampel penulis haya menyediakan dua responden, yang pertama terdiri dari aparat desa yang jumlah populasinya berjumlah tiga orang dan mengambil dua orang sebagai sampel dan pada responden kedua yaitu aparat BUMDes maju Bersama Desa Sawah dimana jumlah populasinya berjumlah tiga orang dan mengambil satu orang sebagai sampel. Dari dua responden tersebut persentasenya adaah seratus persen dan dengan keterangan wawancara.

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sama.¹⁰ Jumlah populasi yang ada di keseluruhan jumlah usaha pada Bundes Maju Bersama. Pada responden pertama penulis membuat tiga orang sebagai populasi dari aparat desa diantaranya Kepala Desa Sawah, Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan Desa dan pada responden kedua penulis membuat tiga orang sebagai populasi yaitu Direksi BUMDes maju Bersama Desa Sawah, dan para staf yang bekerja di BUMDes Maju Bersama Desa Sawah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada responden pertama penulis hanya mengambil dua orang sampel dari jumlah populasi yaitu kepala desa Sawah dan Sekretaris desa dan pada responden kedua penulis hanya membuat satu orang sebagai sampel yaitu Direksi BUMDes maju Bersama Desa Sawah.

5. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :¹¹

a. Data Primer

¹⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.118.

¹¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Dalam hal ini yaitu Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh Bumdes Maju Bersama Desa Sawah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan adalah kamus.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh penelitian bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. observasi merupakan suatu

¹² Sarifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.
¹³ Supranto J., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 40.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹⁴

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data yang ingin diteliti.

c. Studi Pustaka

Peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.¹⁵

7. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskripsikan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

¹⁴ Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 31.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

9. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Dintaranya:

A. Keadaan geografis dan demografis desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Dipoint ini membahas keadaan keografis desa sawah, sejarah desa sawah, keadaan dan batas wilayah desa sawah, jumlah penduduk desa sawah, mata pencaharian penduduk, agama yang dianut penduduk desa sawah, pendidikan penduduk, sosial Budaya dan adat istiadat

B. Visi Misi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi antara lain:

A. Pengertian pelaksanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Penyaluran dana
- C. Peraturan perundang-undangan
- D. BUMDes

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi :

Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewan Ternak Oleh Bumdes Maju Bersama Desa Sawah Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa Di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara..

Upaya BUMDes maju bersama menyesuaikan anggaran jika tidak sesuai dengan dana yang sudah di rencanakan terhadap penyediaan hewan ternak.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. Keadaan Geografis Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Secara Geografis Kecamatan Kampar Utara letaknya sama dengan Geografis Kabupaten Kampar yang terletak pada posisi $1^{\circ}, 02'$ Lintang Utara dan $0^{\circ}, 29'$ Lintang Selatan, $100^{\circ}, 23' - 101^{\circ}, 40'$ Bujur Timur.

Kecamatan Kampar Utara juga merupakan kawasan yang memiliki sebagian wilayah merupakan daratan (90 %), Daerah berbukit (10 %), dengan kemiringan $\pm 9\%$, Penyebaran Daerah datar berada disepanjang aliran Sungai Kampar, sedangkan daerah bergelombang dan berbukit terletak dibagian kecil dibagian selatan dengan ketinggian ± 30 s/d 40 M diatas permukaan laut, sedangkan penyebaran penduduk diwilayah Kecamatan Kampar Utara berada disepanjang aliran Sungai Kampar.¹⁷

2. Sejarah Desa Sawah

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana terdapat 8 desa dan salah satu desa yaitu Desa Sawah. Desa Sawah merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar Utara yang mana terletak ditengah-tengah Kecamatan Kampar Utara dan Kantor Kecamatan Kampar Utara berada di Desa Sawah dan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan jarak 12 Km. Desa Sawah mulai terbentuk melalui program pemekaran dari

¹⁷ Data diperoleh dari data desa

Kenegrian Airtiris dimulai pada tahun 1973 pemerintahan dipimpin oleh Wali Negeri, dan setelah pemekaran Desa Sawah, Desa ini dipimpin oleh seorang Wali Muda yang bernama M. Nasir, pada tahun 1973. Sekarang jumlah penduduk yang ada di Desa Sawah berjumlah 3253 jiwa yang tersebar di 8 wilayah RW dan 16 RT.¹⁸

3. Keadaan dan Batas Wilayah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Desa Sawah merupakan salah satu dari delapan Desa di Kecamatan Kampar Utara. Yang memiliki Luas Wilayah 3790,73 Ha. Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Beriklim Tropis Tipe APF dengan curah hujan berkisar antara Bulan Agustus sampai Maret. Adapun batas wilayah desa sawah antara lain :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kayu Aro
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jalau
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Naga Beralih.

Kecamatan Kampar Utara dilihat dari keadaan alamnya juga merupakan wilayah yang memiliki alam tanahnya yang terdiri dari tanah Pad Solid warna lebih kuning $\pm 60\%$ dari luas wilayah Kecamatan Kampar Utara, tanah gambut original $\pm 10\%$ dari luas wilayah, Alluvial (endapan) $\pm 10\%$ dari luas wilayah, kemudian (endapan) $\pm 7\%$ berada di sepanjang aliran sungai Kampar, iklim Kecamatan Kampar Utara memiliki iklim tropis type dengan jumlah curah hujan 1 (satu) tahun ± 2.975 mm, dengan jumlah curah hujan ± 107 mm/hari dan

¹⁸ Data diperoleh dari kantor desa

memiliki temperatur 26°C s/d 30°C dan memiliki 3 (tiga) musim yaitu : Musim panas, musim hujan dan musim panca roba (musim panas disertai hujan).¹⁹

4. Jumlah penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	laki-laki	1621	50%
2.	perempuan	1632	50%
	jumlah	3253	100%

Sumber: laporan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 2020

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa jumlah penduduk dari 2020 dilihat dari segi jenis kelamin maka total keseluruhan berjumlah 3253 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi umur antara lain :

Tabel II.2

Jumlah penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Klasifikasi Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0-5 thn	427	13%
2.	6-13 thn	621	19%

¹⁹ Data diperoleh dari data desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	14-16 thn	228	7%
4.	19-25 thn	233	7%
5.	26-45 thn	984	30%
6.	46-57 thn	504	16%
7.	58 thn keatas	256	8%
	Jumlah	3253	100%

Sumber: laporan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 2020

Tingkat kematian dan kelahiran dapat di lihat dari dari tabel berikut :

Tabel II.3

Tingkat kelahiran dan kematian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

No.	Kepadatan Penduduk	Jumlah
1.	Angka Kelahiran	37
2.	Angka Kematian	29

Sumber : Rekapitulasi Kepadatan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan angka kelahiran dan kematian

5. Mata Pencarian Penduduk atau Provesi Penduduk

Adapun mata pencarian atau Provesi masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara bisa dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.4

Mata Pencarian atau Provesi Berdasarkan data penduduk di s Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	TNI	3	0%
2.	Polri	0	0%
3.	PNS	67	3%
4.	Buruh	89	4%
5.	Swasta	896	37%
6.	Petani	672	27%
7.	Nelayan	15	1%
8.	Pengangguran	709	29%
	Jumlah	2451	100%

Sumber : Profil Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

6. Agama

Dari hasil rekapitulasi data Sistem Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Kampar. Penduduk mayoritas beragama Islam di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Di desa sawah terdapat 5 masjid dan 8 musolah, berikut reka datanya:²⁰

Tabel II.5

Jumlah Rumah Ibadah di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2021

NO.	Dusun	Mesjid	Musolah
1.	Sawah	2	3
2.	Tanjung	1	3

²⁰ Data diperoleh dari kantor desa Sawah

3.	Pulau Tonga	1	1
4.	Sangkar Puyuh	1	2
	Jumlah	5	9

Sumber : Profil Kecamatan Kampar Utara

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kecamatan Kampar Utara. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan SD, SLTP/MTS, SLTA/SMK, dan perguruan tinggi di Kecamatan Kampar Utara tahun 2021.²¹

Tabel II.6

Jumlah Sarana Pendidikan TK/ PAUD, SD, SMP/MTs, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Tahun 2021

NO.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/ PAUD	3
2.	SD	2
3.	SMP/MTS	1
4.	SMA/SMK	0
5.	Perguruan Tinggi	0

²¹ Data diperoleh dari kantor desa Sawah

	Jumlah	6
--	---------------	----------

Sumber : Profil Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel II.7

Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Kampar Utara Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	301	28%
2.	SMP	243	23%
3.	SMA	305	28%
4.	Kejuruan	52	5%
5.	Perguruan Tinggi	176	16%
	Jumlah	1077	100%

Sumber : Profil Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

8. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Kampar Utara masih dikatakan masyarakat yang asli, dimana keberadaan tingkat sosial budaya masyarakat Kecamatan Kampar Utara masih Homogen yang sebagian masyarakatnya masih dikatakan bermukim secara asli (tempatan) yang turun temurun mewarisi budaya atau gaya hidup yang Matrialinear yaitu garis keturunan ibu, dengan adat tradisi Ninik Mamak sebagai piminan adat menurut suku masing-masing dimana pepatah adat mengatakan “ *Tali Bapilin Tigo* “ (*Pemerintah, Ulama/Pimpinan Agama Dan Ninik Mamak*) yang artinya bahwa dalam mengambil keputusan dan tindakan

harus berpedoman pada Aturan yang berlaku dalam hidup dan kehidupan masyarakat dan juga berazaskan musyawarah dan mufakat.

Masyarakat Kecamatan Kampar Utara ada sebagian penduduknya adalah penduduk pendatang yang berdomisili di daerah ex. Transmigrasi dimana tingkat sosial budayanya masih memegang adat istiadat daerahnya. (Jawa, Batak, dll).²²

9. Adat Istiadat

Masyarakat Desa sawah Kecamatan kampar Utara menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat, masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukann upara syukuran pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royong an dalam membangun desa.²³

Adapun permuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjumlah lima orang yang di angkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan di angkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.

Sarana transfortasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transfortasi angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga dan ojek yang beroperasi setiap harinya. Dalam kesaharian sarana tranfortasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi

²² Diperoleh dari data kecamatan

²³ Data diperoleh dari data kecamatan

kepasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dagang. Sarana komunikasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima sebagai informasi dan berita-berita melalui darana Radio dan Televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

B. Visi Dan Misi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

1. Visi

1. Kebersamaan dalam membangun demi Desa Sawah yang lebih Maju dan Berakhlak
2. Peningkatan Infrastruktur Desa Sawah
3. Terwujudnya Pelayanan Public yang di dukung Oleh sumber Daya Aparatur Dan sumber Daya Alam Yang Mandiri,Agamis, Sejahtera Lahir Batin.

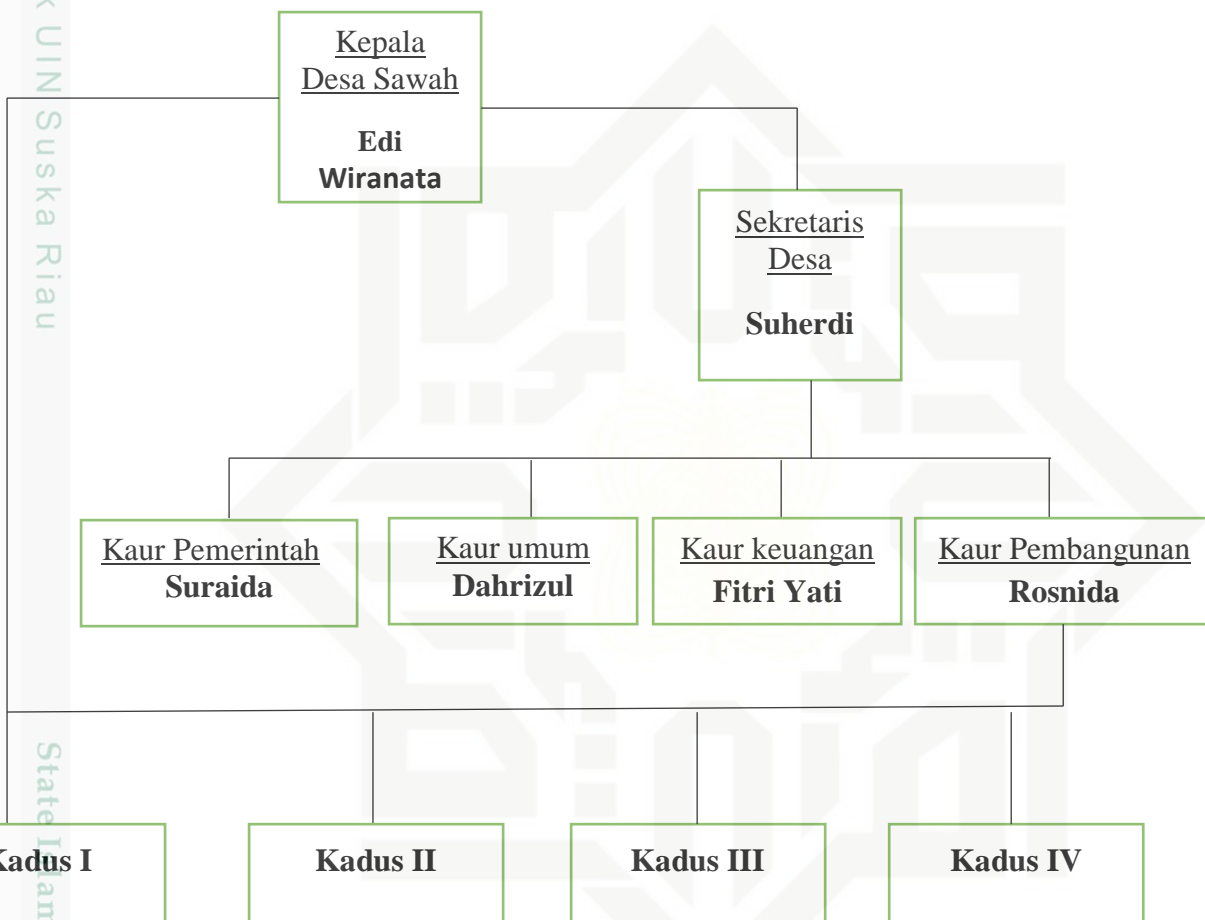
2. Misi

1. Bersama Masyarakat memperkuat Kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani Masyarakat secara optimal
2. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
3. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Sawah yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

²⁴ Data diperoleh dari data desa

Gambar I.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sawah KecamatanKampar Utara
Kabupaten Kampar Tahun 2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

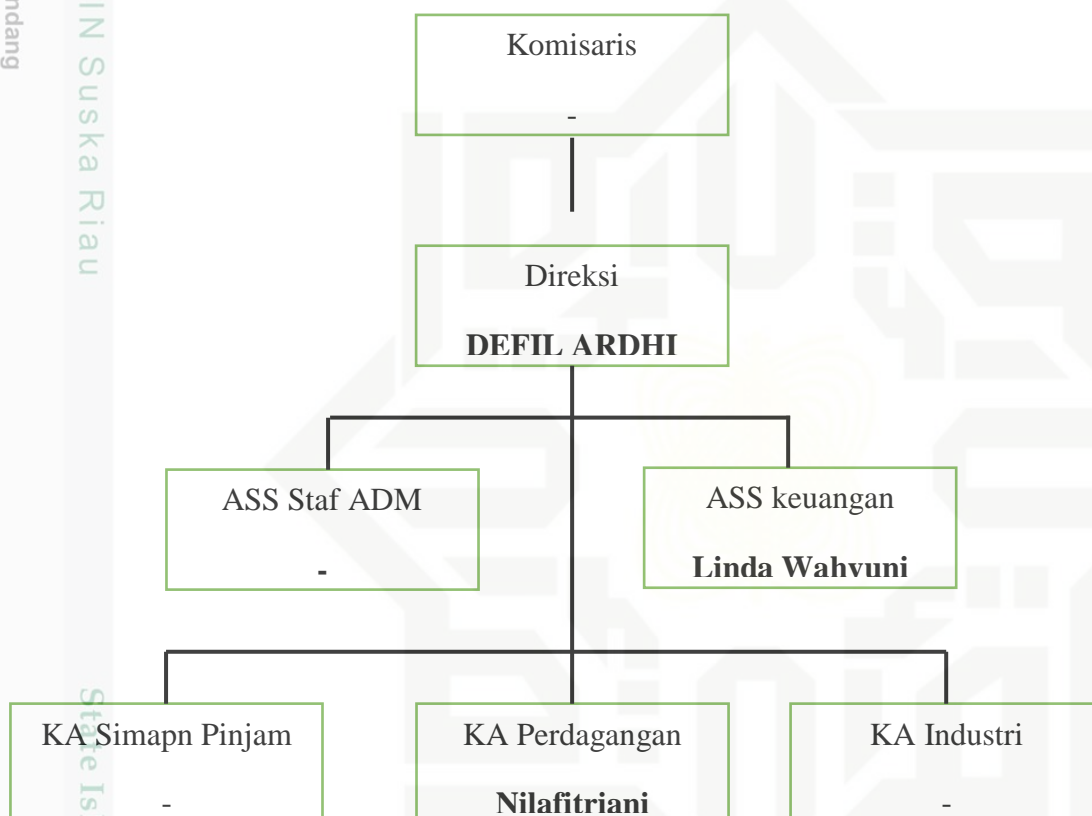
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II

**Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama Desa Sawah
KecamatanKampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2021**





BAB III

TINJAUAN TEORISTIS

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sebastiar Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.²⁵

Dengan demikian implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *Implementation*

²⁵ Jurnal Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Site Ismail University of Suska Riau
Kasim Riau

*is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.*²⁶

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²⁷

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana Menurut kasmir dalam pengertian penyaluran dana bank mengatakan penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.²⁸ Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan.²⁹ Sedangkan dana menurut KBBI adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.³⁰ Maka dapat

²⁶ INTAN FITRI MEUTIA, *Analisis Kebijakan Publik*, h. 78

²⁷ Astrella Janice, *Op.Cit*

²⁸ Jurnal. Lilywijayawati. *Analisis Sumber Dana Dan Penyaluran Dana Dengan Laba Bersih PT Bank Bumi Putera Tbk, Indonesia*

²⁹ <https://lektur.id>

³⁰ *ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan penyaluran dana merupakan proses, cara atau perbuatan menyalurkan uang yang disediakan untuk suatu keperluan.

Sedangkan pada Penyaluran dana desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance akan akuntabilitas dana desa.³¹

1. Keuangan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke

³¹ Kementrian Keuanagan, Buku Saku Dana Desa

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,, diantaranya :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.³²

b. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

³²

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.³³

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

³³ ibit

³⁴ Jurnal Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan dana desa di atur dalam peraturan bupati kampar nomor 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan dan pembagian alokasi dana desa di kabupaten kampartahun anggaran 2019. Dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi ”pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa”.

Juga dijelaskan dalam pasal yang sama ayat 16 yang berbunyi “Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa”³⁵

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.³⁶

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)³⁷

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang

³⁵ Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan dan pembagian alokasi dana desa di kabupaten kampartahun anggaran 2019, h.4

³⁶ ibid

³⁷ Jurnal Wida Puspawardani, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa. Baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang diaturnya desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.

Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur tentang perlunya menerapkan kaidahkaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidahkaidah dalam bidang pengelolaan pemerintah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa.

Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.³⁸

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut Pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan menurut Balderton mengemukakan bahwa: “istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Selanjutnya Soekanto mengemukakan bahwa: “Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.” Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa juga harus dapat merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

³⁸ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari:³⁹

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
3. Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota
4. Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota
5. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)
6. Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah

Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari:

- a. Belanja langsung meliputi :
 1. Belanja pegawai/penghasilan tetap
 2. Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
 3. Belanja tunjangan
 4. Belanja subsidi
 5. Belanja hibah
 6. Belanja bantuan sosial
 7. Belanja bantuan keuangan

³⁹ Jurnal Wida Puspawardani *Loc.Cit.h.2*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Belanja tidak terduga
- b. Belanja langsung meliputi:
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja barang dan jasa
 3. Belanja modal

Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.⁴⁰

C. Peraturan Perundang Undangan

Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

umum. Undang-undang dalam arti formal merupakan undang-undang yang ditinjau dari tata cara pembentukannya.⁴¹

Peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Di sisi lain, Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam *Juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai: *pertama*, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Definisi ini juga diperkuat oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki makna sebagai: *pertama*, proses atau tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan; *kedua*, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun sebenarnya, Soehino lebih sering menggunakan istilah 'Peraturan Perundangan'.

Bersamaan dengan Soehino, Amiroeddin Syarief juga menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah itu lebih pendek dan oleh karenanya sangat ekonomis. Istilah tersebut pernah digunakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sebagaimana tercantum pada judul ketetapan tersebut yaitu Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan

⁴¹ Mukhlis, Amrizal, Dedi Syahputra, *Modul Perancangan Peraturan Perundangan-Undangan*, h. 1-2

Perundangan Republik Indonesia. Selain itu, beberapa Ketetapan MPR RI yang menggunakan istilah ‘Peraturan Perundang-undangan’ adalah sebagai berikut:⁴²

1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam program pembangunan hukum menyebutkan “upaya penggantian peraturan Perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”
2. Reformasi MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Hukum Negara, pada huruf C Bidang Hukum yang menyebutkan, “Pembangunan hukum khusus yang menyangkut peraturan Perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Ketetapan MPR-RI No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, antara lain:
 - a. Pasal 3 menyebutkan, “dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ini, dapat diatur dalam *peraturan Perundang-undangan*.”
 - b. Dalam arah kebijakan bidang hukum, Pasal 7 menyebutkan, “mengembangkan *peraturan Perundang-undangan* yang mendukung

⁴² Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, *Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, h.1.4

kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.⁴³

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama

⁴³ Mukhlis, Amrizal, Dedi Syahputra, *Op.Cit*, h.1.4-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁴⁴

Permendesa Nomor 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19 menyatakan beberapa jenis usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan bidang usaha, antara lain:⁴⁵

1. Bisnis sosial yaitu bisnis dengan cara memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)*

⁴⁵ *Permendesa Nomor 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bisnis penyewaan (renting) adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan lainnya.
3. Usaha perantara yaitu memberikan jasa pelayanan kepada warga bisa dalam bentuk jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat atau jasa pelayanan lainnya.
4. Bisnis produksi/perdagangan dengan memproduksi/berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas berupa pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Bisnis keuangan adalah memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa.
6. Usaha Bersama merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur/dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama, jenis usaha ini misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspresif, desa wisata yang mengorganisi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat ataupun kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis-jenis usaha lokal lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis usaha yang dipilih bersama oleh pengelola BUM Desa merupakan hasil kesepakatan seluruh masyarakat yang disetujui melalui forum musyawarah desa. Untuk menentukan jenis usaha, pengelolala BUM Desa akan memulai dengan perhitungan kelayakan usaha yang cermat dalam membuat pemetaan potensi yang ada di desanya. Pengkajian keadaan desa ini bisa dimulai dengan pembuatan daftar masalah dan potensi di desa kemudian dikelompokkan dan penentuan tindakan berdasarkan skala prioritas desa yang disandingkan dengan rencana program yang ada di desa baik RPJM Desa atau RKP Desa.⁴⁶

Salah satu sumber data yang menjadi input dalam pembuatan kajian kelayakan usaha adalah banyaknya potensi sumber daya alam di perdesaan yang harus diprioritaskan. Dokumentasi hasil kajian tersebut biasanya disebut sebagai uji kelayakan usaha atau PKU (Potensi Kelayakan Usaha) yaitu kajian untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Kajian ini juga dapat menjadi alat untuk mengukur aspek dan strategi pasar, pesaing, *break even point*, serta berapa kebutuhan investasi agar usaha bisa berjalan. Dokumen PKU biasanya memuat aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya dan politik serta aspek hukum.

Modal awal BUM Desa menurut Pasal 17 Permendesa No. 4 Tahun 2015 berasal dari APB Desa yang dapat disertai dengan penyertaan modal yang berasal dari desa atau dari masyarakat. Penyertaan Modal Desa dapat berupa:⁴⁷

⁴⁶ Farida Yustina NFP, Arif Purbantara, *MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)*, h.3-4

⁴⁷ *Permendesa No. 4 Tahun 2015*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hibah dari pihak swasta/lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
2. Bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa diperoleh dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat. Modal usaha untuk BUM Desa bisa dimulai dari skala kecil, yang terpenting sebagai lembaga ekonomi sudah memiliki keuntungan meskipun sedikit. Nantinya keuntungan ini akan berbanding lurus dengan jumlah modal yang diinvestasikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh BUMDes maju bersama desa sawah berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa di desa sawah, kecamatan kampar utara belum terlaksana dengan baik. Karena terhambat oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan baik dana desa maupun dana bantuan dari provinsi mengalami penurunan anggaran yang cukup besar yaitu sekitar 70% dan tidak dapat terrealisasikannya pasal 4 huruf e Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa mengenai Bidang usaha Badan Usaha Milik Desa MAJU BERSAMA Desa Sawah salahsatunya mengenai penyediaan hewan ternak. Juga ada beberapa langkah yang harus ditempuh sebelum pelaksanaan penyaluran dana dilakukan seperti perencanaan dengan pengajuan proposal oleh BUMDes pada kantor desa, penelaahan atau pengkajian yang dilakukan oleh aparat desa dan tahap terakhir yaitu pengesahan dan pelaksanaan pencairan dana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Upaya BUMDes Maju Bersama menyesuaikan anggaran jika tidak sesuai dengan dana yang sudah di rencanakan terhadap penyediaan hewan ternak adalah dengan memperkecil jumlah hewan trnak yang akan disediakan. Sedangkan dari aparat desa sendiri mengatakan apabila dana tidak bisa menutupi anggaran yang sudah diajukan maka aka ada tinjauan ulang, analisa kembali bagaimana efektifitasnya, Atau dengan Mengembangkan usaha yang telah ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

1. Direksi BUMDes Maju Bersama Desa Sawah hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan bila dana desa tidak dapat mengcover jumlah dana yang diajukan dalam penyediaan Hewan ternak.
2. Kepada Masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar agar dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terhadap keberlangsungan BUMDes Maju Bersama Desa Sawah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*.

Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Kementrian Keuanagan, *Buku Saku Dana Desa*

Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta : LP3ES, 1989)

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta : PT .Raja. Grafindo Persada).

Sarifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H., Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., M.

Yahdi Salampessy, S.H, M.H. *Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Supranto J., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

B. Undang-Undang

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa pasal 1 ayat (1).

Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan dan pembagian alokasi dana desa di kabupaten kampar tahun anggaran 2019.

PERDes Desa sawah Kecamatan Kampar Utara nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milk Desa.

C. Internet

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

<https://kbbi.web.id/subjek.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

<https://lektur.id>

<http://repository.unwira.ac.id>

D. Jurnal

Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau.*

Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti, *TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar).*

Dra. Harmiati, M Si, dan Abdul Aziz Zulhakim, S. Sos., M. Si. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean.*

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*

Lilywijayawati. *Analisis Sumber Dana Dan Penyaluran Dana Dengan Laba Bersih PT Bank Bumi Putera Tbk, Indonesia.*

Rizki Febri Eka Pradani, *PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA.*

Sayekti Suindyah Dwiningwarni, *PERANAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI JOMBANG JAWA TIMUR.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wida Puspawardani, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul ***“PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DAN UPAYA BUMDes MAJU BERSAMA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA”*** yang ditulis oleh :

Nama : **Depi Permata Sari**
 NIM : **11727200129**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Senin, 11 Oktober 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr.H.Erman, M.ag

Sekretaris
Hendri Sayurti, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Darwis., SH., MH

Penguji II
Dr. H. Maghfirah, MA

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4743/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEPI PERMATA SARI
NIM : 11727200129
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Desa Sawah Kec. Kampar Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan penyaluran dana dalam penyediaan hewan ternak oleh bumdes maju bersama
desa sawah berdasarkan peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang badan usaha milik desa
di desa sawah, kecamatan kampar utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilang-Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/512

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4743/2021 tanggal 2 Juli 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : DEPI PERMATA SARI |
| 2. NIM | : 11727200129 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDES MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA |
| 8. Lokasi | : 1. KANTOR DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
2. BUMDES MAJU BERSAMA DESA SAWAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Utara di Sawah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR UTARA

SAWAH

KODE POS : 28461

Sawah, 14 Juli 2021

Nomor : 070/Kessos / 213
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Riset**

Kepada Yth,
Kepala Desa Sawah Kec.Kampar Utara.

Di-

TEMPAT

بسم الله الرحمن الرحيم
السلم عليكم وراحمة الله وبراکاة

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/512 Tanggal 13 Juli 2021, Perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama :

Nama	: DEPI PERMATA SARI
Nomor Mahasiswa	: 11727200129
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Fakultas/Jurusan	: ILMU HUKUM
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDES MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
Lokasi Penelitian	: 1.DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA 2.BUMDES MAJU BERSAMA DESA SAWAH

Untuk itu Kami Camat Kampar Utara pada prinsipnya dapat memberi izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. .

Pelaksanaan Riset tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian Kami sampaikan kiranya Saudara dapat membantu pelaksanaan Riset tersebut sebagaimana mestinya.

والسلم عليكم وراحمة الله وبراکاة

An. CAMAT KAMPAR UTARA
SEKCAM



NURHYATLSH

Penata Tingkat I

NIP.19650815 198703 2 007

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN KAMPAR UTARA

KANTOR KEPALA DESA SAWAH

ALAMAT : Jln. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

KODE POS : 28461

Sawah, 19 Juli 2021

Kepada Saudara

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Suska
Riau

Di_
Pekanbaru

Nomor : 140/Pem/347
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Nomor : 070/BKBP/
IZIN-RISET /512/ tanggal 13 Juli/ 2021, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan
Data untuk bahan skripsi Atas Nama :

Nama : **DEPI PERMATA SARI**
Nomor Mahasiswa : 11727200129
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM
PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDES MAJU
BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN
DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA**

Lokasi Penelitian :
1. DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
2. BUMDES MAJU BERSAMA DESA SAWAH

Dengan ini Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Pada prinsipnya memberikan izin
atau merekomendasikan nama yang tersebut diatas melakukan kegiatan penelitian / pengumpulan data di
Desa Sawah dan akan mengadakan Riset selama 6 (enam) bulan sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan:

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr Wb.

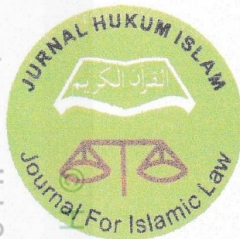
DIKELUARKAN DI: S A W A H
PADA TANGGAL : 19-07-2021
An. KEPALA DESA SAWAH
SEKRETARIS DESA



Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DEPI PERMATA SARI
NIM : 11727200129
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DALAM PENYEDIAAN HEWAN TERNAK OLEH BUMDes MAJU BERSAMA DESA SAWAH BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILK DESA DAN UPAYA BUMDes MAJU BERSAMA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI DESA SAWAH, KECAMATAN KAMPAR UTARA

Pembimbing: Firdaus, S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 November 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS--



DEPI PERMATA SARI, lahir di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 27 Agustus 1998, merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak M. Syafi'i dan Ibu Nurmiati. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 010 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 2004-2011, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs Desa Sawah selama tiga tahun dari tahun 2011-2014. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kampar selama tiga tahun dari tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Jalur SNMPTN. Penulis melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Penyaluran Dana Dalam Penyediaan Hewn Ternak Oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sawah Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dan Upaya BUMDes Maju Bersama Meningkatkan Perekonomian Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, di bawah bimbingan Bapak Firdaus SH., MH. berdasarkan hasil ujian sarjana Syariah dan Hukum pada tanggal 11 Oktober 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,33 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).